



Dana BLM Rp 5 M Siap Dibagi

UMBULHARJO -- Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sejumlah Rp 5,435 miliar untuk 45 kelurahan se-Kota Jogja siap dibagikan. Dana itu secara simbolis diserahkan Wakil Walikota Jogja Imam Priyono DP kepada Ketua Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Jogja, Harsoyo, yang juga Ketua BKM Kelurahan Kotabaru -- Kecamatan Gondokusuman, Kamis (13/3), di Ruang Utama Atas Balaikota Jogja.

Kepala Bidang Permukiman, Saluran Air Limbah Dinas Kimpraswil Kota Jogja Ir Hendra Tantarul menjelaskan, dana itu berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pusat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) tahun 2014 sebesar Rp 5,201 miliar atau sebesar 95 persen. Sedangkan Dana Pendamping atau Dana-dana Urusan Bersama (DDUB) dari APBD Kota Jogja sebesar Rp 273,7 juta atau 5 persen.

Menurut Hendra, mekanisme pencairan BLM melalui beberapa tahapan di antaranya pengurus BKM harus membuat daftar kegiatan pembangunan sosial, lingkungan dan ekonomi di kelurahan masing-masing.

Pada April 2014, BLM tahap pertama sebesar 60 persen yang semuanya dari APBN dicairkan melalui rekening BKM di masing-masing kelurahan. Dana dapat dicairkan dengan catatan BKM sudah membuat pemberkasan pengajuan dana.

Adapun pencairan tahap kedua, sisa dana 40 persen yakni 35 persen APBN dan 5 persen APBD 2014 Kota Jogja dicairkan pada bulan Juli 2014.

Selain penyerahan BLM kepada BKM di 45 kelurahan juga dilaksanakan sosialisasi dan penyusunan kerja PNPM-MP yang dilaksanakan oleh Kimpraswil Kota Jogja yang juga sebagai Satker Kota Jogja.

Tujuan sosialisasi ini untuk mereview dan mengkaji ulang pelaksanaan PNPM

Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2013, melalui para pelaku serta merumuskan program kerja tahun 2014.

Ada tiga kunci pokok PNPM-MP dalam mengentaskan kemiskinan yakni terwujudnya iklim transparansi di semua tingkat baik pemerintah maupun masyarakat.

Selain itu, juga mendorong partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik sebagai prinsip konsistensi dan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan dan program yang dilakukan.

"Harapannya, penerapan ketiga prinsip ini, program penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada Community Based Development (CBD) dapat terus sejalan dengan target pencapaian tujuan pembangunan MDG's untuk mengurangi angka kemiskinan sebesar 15 persen hingga tahun 2015," papar Hendra.

Wakil Walikota Jogja Imam Priyono DP mengatakan Pemerintah Kota Jogja berharap semua kegiatan pembangunan di masyarakat harus tepat sasaran dan efisien. Dampaknya bisa dapat mengurangi angka kemiskinan.

"Yang sangat diharapkan Pemerintah Kota Jogja dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat miskin adalah pembangunan yang tepat sasaran. Dengan biaya seefisien mungkin tetapi sasaran tepat dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan," kata dia.

Menurut Imam, untuk mengurangi angka kemiskinan salah satunya melalui program kerja dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang direalisasikan dalam bentuk kerja dan kegiatan tepat sasaran.

Diharapkan para pengurus BKM betul-betul merencanakan semua program dengan baik, melaksanakan dengan transparan, akuntabel dan tepat sasaran, agar cita-cita mengurangi angka kemiskinan di Kota Jogja terwujud. (fir)

Instansi	
1. <u>Din. Kimpraswil</u>	
2.	
3.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005